

H A R I A N

LENTERAInspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI KAMIS / 18 Juni 2020

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

"Hanya kamu dan kamu sendirilah yang dapat mengubah keadaanmu. Jangan salahkan apa pun atau siapa pun."

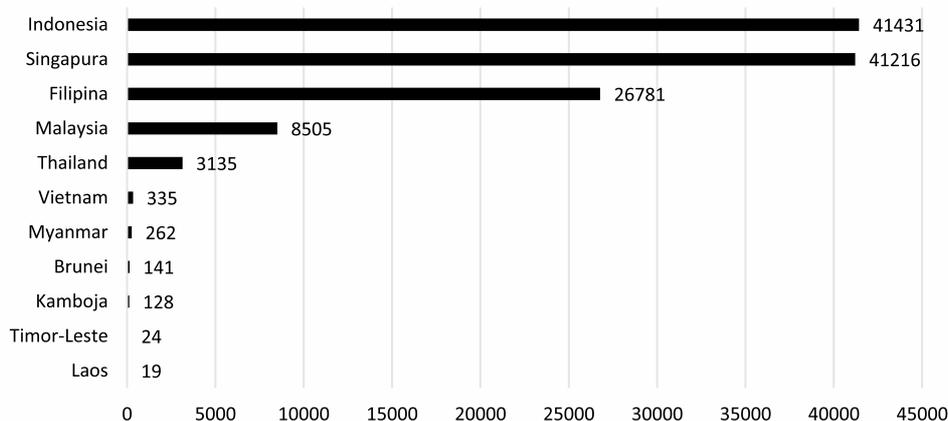
Leonardo DiCaprio, American actor

'THE HUNGRY MAN BECOMES AN ANGRY MAN'

Ungkapan menggelitik Ketua Gugus Tugas Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo, "The hungry man becomes an angry man," menjabarkan 'ancaman' terberat Indonesia akibat pandemi Covid-19 saat ini. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, per 27 Mei 2020 sebanyak 3.066.567 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Bila aktivitas ekonomi dipaksa berhenti total, warga yang lapar pun akan memicu kemarahan massal. Itulah salah satu alasan pemerintah terus mengeluarkan jurus penggerak sektor usaha, di saat jumlah pasien positif corona di Indonesia terus naik, bahkan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara.

Baca Hal 11

PERBANDINGAN KASUS POSITIF CORONA DI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA

**UPDATE PERKEMBANGAN
VIRUS CORONA**

	KASUS POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
INDONESIA	41,431	16,243	2,276
<i>Seluruh Dunia</i>	8,184,331	3,966,877	443,960

Update : 17 Juni 2020 Pukul 16.02 PM
Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins

CEK SEKITAR YUK! PEMKOT SURABAYA BUKA DATA ALAMAT PASIEN COVID-19

Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka data alamat pasien Covid-19 dalam bentuk peta. Itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memerangi virus Corona.

Wakil Koordinator Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Surabaya M Fikser memastikan, pembuatan peta alamat pasien COVID-19 sudah mempertimbangkan psikologis warga. Menurutnya, kini warga lebih tenang dan tidak gampang panik dengan kabar adanya pasien positif Corona di lingkungannya.

"Beda dengan dulu di awal-awal ada kasus. Kalau dulu kita buka petanya seperti ini, bisa panik semua warga dan tentu psikologisnya akan terganggu. Sehingga bisa menurunkan imun juga," kata Fikser di kantornya, Rabu (17/6).

Fikser menambahkan, data dalam peta itu hanya menunjukkan alamat jalan. Atau gang pasien positif Covid-19. Sementara untuk nama dan alamat detail rumah pasien tidak dijabarkan dalam peta tersebut. Warga bisa melihat peta itu di lawancovid-19.surabaya.go.id.

"Data alamat detailnya itu kami sudah berikan kepada Satgas Kampung Wani Jogo Suroboyo, pihak kelurahan dan pihak Puskesmas. Tujuannya tentu untuk bersama-sama melindungi warga yang positif itu, bukan lagi mengucilkan mereka," pungkas Fikser.

Fikser juga memastikan bahwa dalam peta sebaran Covid-19 di Kota Surabaya itu muncul empat kode warna. Warna merah menunjukkan ada pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, warna hijau muda menunjukkan tidak ada pasien terkonfirmasi pasien positif Covid-19, warna hijau tua menunjukkan bahwa pernah ada pasien

konfirmasi Covid-19 namun sudah sembuh atau meninggal. "Sedangkan warna biru menunjukkan bahwa di wilayah tersebut sudah dilakukan rapid tes dan tes swab massal," katanya.

Dengan adanya peta sebaran ini, maka diharapkan warga lebih meningkatkan partisipasinya dalam melindungi warga lainnya. Bahkan, diharapkan pula bisa lebih meningkatkan kehati-hatiannya dalam menjalankan aktivitasnya. Sebab, Fikser sangat sadar persoalan pandemi Covid-19 ini bukan hanya persoalan pemerintah yang harus menyelesaikannya, tapi juga butuh partisipasi dan kerjasama yang baik dari warga Kota Surabaya. "Pemkot tidak bisa sendiri mengatasi ini, tapi kita harus bergandeng tangan memerangi pandemi ini," tegasnya.

Fikser juga menjelaskan dengan dibukanya data sebaran pasien positif ini, maka para pelaku ojek online juga bisa meningkatkan kehati-hatiannya. Bahkan, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak ojek online untuk ikut memperhatikan peta sebaran ini. "Para driver ojek online ini bisa lebih hati-hati ketika harus mengantarkan orang atau barang ke gang-gang yang ada tanda merahnya itu," katanya.

Kepala Diskominfo ini juga memastikan bahwa data yang terdapat di peta sebaran itu akan terus diupdate secara berkala. Sebab, hingga saat ini terus dilakukan rapid tes dan tes swab massal dan banyak pula yang sudah sembuh. "Jadi, pasti datanya terus update, apalagi tren kesembuhan terus meningkat setiap harinya," kata dia.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya yang juga Kepala BPB dan Linmas Surabaya, Irvan Widyanto,



Wakil Koordinator Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Surabaya M Fikser

mengatakan dengan dibukanya peta sebaran pasien Covid-19 ini, maka warga akan saling melindungi antara warga yang satu dengan yang lainnya. Tentunya, ini juga akan sangat mendukung kinerja satgas-satgas dari Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. "Ini juga sejalan dengan hakekat atau filosofi dari Perwali nomor 28 tahun 2020, dimana Ibu Wali Kota ingin memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mendisiplinkan diri dalam menerapkan protokol kesehatan," kata Irvan.

Makanya, dalam situasi yang sangat sulit ini, Walikota Risma tidak ingin membebani warganya dengan pengenaan denda-denda. Sebab, yang dibutuhkan saat ini adalah kesadaran masyarakat dan masyarakat perlu dirangkul untuk menertibkan masyarakat yang lain.

"Sekali lagi, filosofi dari Perwali itu adalah Ibu Walikota menaruh kepercayaan kepada masyarakat. Dengan begitu, kesadaran masyarakat akan tumbuh. Nah, ketika kesadaran itu tumbuh, maka itulah arti mitigasi yang sebenarnya. Jadi, saat ini masyarakat tidak butuh ditekan-tekan lagi oleh aparat dan sebagainya, tapi yang dibutuhkan sekarang ini adalah masyarakat dirangkul untuk mengatur masyarakat yang lain," tegasnya. (ard)

NEW NORMAL DI BLITAR TERGANJAL 50% KECAMATAN ZONA MERAH

Blitar - Rencana persiapan New Normal Life di Kabupaten Blitar, terganjal kondisi 11 kecamatan atau 50% dari total 22 kecamatan yang masih berstatus zona merah. Kondisi ini disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti ketika ditanya mengenai penambahan kecamatan yang masuk menjadi zona merah, yaitu Kecamatan Wonodadi. "Karena adanya tambahan 1 pasien terkonfirmasi positif, di wilayah Kecamatan Wonodadi," tutur Krisna, Selasa (17/6).

Lebih lanjut dijelaskan Krisna jika dalam rangka persiapan New Normal Life, kini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sedang menyusun regulasi terkait dengan kepentingan masyarakat banyak. "Mulai dari pendidikan, tempat ibadah, keagamaan, perkantoran, ASN, pelayanan kesehatan,

ekonomi dan lainnya sedang dipersiapkan," jelasnya.

Selain pertimbangan separuh kecamatan di Kabupaten Blitar yang masih termasuk zona merah, juga adanya Orang Tanpa Gejala (OTG). Dimana sesuai data terakhir pada 17 Juni 2020 ini, jumlah OTG ada 2 orang. Yakni keduanya tampak sehat, tidak menunjukkan gejala sakit tapi terkonfirmasi positif Covid-19 dan bisa menularkan kepada yang lain. "Yaitu lelaki di Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Selopuro, keduanya diketahui dalam bulan Juni ini," ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk menyikapi kondisi ini direncanakan akan dilakukan Swab Test secara intensif. Dengan sasaran orang yang kontak erat dengan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan kontak erat dengan pasien positif Covid-19. "Yang paling bahaya dan beresiko besar menularkan adalah OTG,



Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti

karena tidak kelihatan sakit atau menunjukkan gejala klinis dan merasa sehat," tandas Krisna.

Sementara ini sambil menunggu Peraturan Bupati (Perbup) tentang New Normal Life, dibuatkan Surat Edaran untuk mengatur kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan di pondok pesantren yang akan dimulai, "Termasuk untuk kegiatan

Baca Hal 11

DPR RI DESAK PLN PERBAIKI SISTEM PENCATATAN KONVENSIONAL

Jakarta- Komisi VII DPR RI memanggil Direktur Utama PT PLN (Persero) beserta jajarannya, guna membahas kenaikan tagihan listrik yang dialami masyarakat. Para wakil rakyat pun mendesak segera adanya perbaikan sistem pencatatan yang dikatakan menjadi penyebab lonjakan tagihan listrik pada Juni.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini mengakui salah satu penyebab terjadinya lonjakan tagihan listrik pada Juni lantaran petugas pencatatan listrik tidak datang ke rumah pelanggan pada bulan April dan Mei. Hal itu dilakukan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 dan adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.

"Menurut saya apakah ada evaluasi ke depannya khususnya, dengan sistem konvensional yang manual ini, mungkin strategi ke depan PLN mempunyai sistem yang lebih menarik dan sistem yang lebih canggih di sistem IT," kata Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Gerindra Moreno Soeprapto, dalam rapat kerja dengan PLN yang ditayangkan secara daring, Rabu (17/6).

Moreno menyarankan agar ke depan PLN memikirkan sebuah sistem yang lebih praktis sehingga petugas pencatatan listrik tidak perlu datang ke rumah untuk mencatat. Selain itu dirinya meminta agar PLN memperbaiki komunikasi masyarakat.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar Rudy Mas'ud menilai sosialisasi yang dilakukan PLN ke masyarakat masih sangat kurang. "Ini menunjukkan tata tertib dan keterbukaan di PLN masih sangat kurang," ujar Rudy.

Sebelumnya PT PLN sedang menyiapkan peta jalan untuk penggunaan teknologi dalam pencatatan konsumsi listrik pelanggan. Hal ini seiring dengan maraknya berbagai komplain dari masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik.

Senior Executive Vice President Bisnis & Pelayanan Pelanggan PLN, Yuddy Setyo Wicaksono, mengatakan pergantian ini ditujukan bagi kwh meter konvensional dengan pencatatan secara manual. Pasalnya, pengukuran pencatatan listrik perlu mengadopsi teknologi secara real time.

Meski begitu, perusahaan setrum pelat merah tersebut setidaknya memerlukan waktu hingga tujuh tahun guna mengganti seluruh kwh meter konvensional bagi 79 juta pelanggan. "Perlu waktu tujuh tahun untuk seluruh pelanggan sebanyak 79 juta, dengan smart meter maka pelanggan akan lebih mudah untuk misalnya token isi ulang," ujar dia dalam Rapat Koordinasi Perlindungan Konsumen Sektor Listrik dan Gas Rumah Tangga, Senin (15/6) lalu.

Terkait tuduhan menaikkan tarif, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menegaskan, lonjakan tagihan listrik yang dialami sejumlah pelanggan bukan diakibat-



Pencatatan listrik yang masih konvensional menjadi salah satu pemicu tarif listrik tidak sesuai kondisi di lapangan

kan adanya kenaikan tarif listrik ataupun praktik subsidi silang untuk menambal insentif yang diberikan perseroan.

"Sebelumnya kita sampaikan bahwa lonjakan kenaikan tagihan listrik tidak disebabkan oleh adanya kenaikan tarif listrik maupun adanya subsidi silang dalam tarif listrik," tuturnya. Lebih lanjut, Zulkifli menjelaskan, kenaikan tarif listrik hanya bisa dilakukan oleh pemerintah bersama dengan anggota DPR. Dimana terakhir kali tarif listrik mengalami kenaikan ialah pada bulan Januari tahun 2017. "Dan PLN berada dalam posisi menjalankan misi tersebut," katanya. (ist,ins)

SOAL PEMBANGUNAN JL. PAHLAWAN, DPRD MADIUN: TAK PERLU JADI POLEMIS

Madiun- Warga mengeluhkan pembangunan Jalan Pahlawan Kota Madiun dengan penambahan ornamen serta polisi tidur jumbo yang dinilai malah mengurangi fungsi jalan. Menanggapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun mengimbau warga lebih sabar karena proses pembangunan belum selesai sepenuhnya.

"Coba kita sabar dulu, ditunggu hasil akhirnya seperti apa baru bisa diperdebatkan. Misalnya ternyata ini tidak sesuai. Tapi menurut saya itu tidak perlu dipolemikkan. Saya yakin hasil akhirnya pasti baik," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono, Rabu (17/6).

Politisi Partai Demokrat itu yakin jika Pemkot Madiun tidak memiliki tujuan merusak kenyamanan masyarakat. Sebab, visi misi Pemkot melalui Kepala Daerah dinilai sudah sangat jelas.

"Sejauh itu manfaatannya jelas, karena polisi tidur itu diharapkan bisa mengurangi laju kencang kendaraan sebagai kawasan sangat ramai. Makanya dikasih itu biar kelihatan dan kendaraan melambat melambat. Kan gitu logika berfikirnya," tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum



Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono

dan Tata Ruang (PUPR) Kota Madiun Suwarno menjelaskan jika pembangunan speed table di Jalan Pahlawan tidak melanggar Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Pada pasal 3 ayat 5 huruf b disebutkan bahwa aturan speed table memiliki ukuran tinggi antara 8-9 sentimeter, lebar bagian atas 660 sentimeter, dan kelandaian paling tinggi 15 persen. "Sedangkan, speed table di Jalan Pahlawan setelah proses pengaspalan nanti tingginya hanya 8

sentimeter dan kelandaian tidak sampai 1 persen," jelasnya.

Terkait viralnya speed table Jalan Pahlawan di media sosial, Suwarno menuturkannya pihaknya tak terlalu menanggapi. Meski begitu, dia berharap masyarakat bisa lebih bijak sebelum memberikan komentar. "Sebaiknya klarifikasi dulu, apakah proyek ini sudah selesai apa belum. Padahal ini (speed table Jalan Pahlawan, red) belum selesai, tapi sudah ramai," paparnya. (Sur)

KADES DIDUGA TERBITKAN SK TAK SESUAI ATURAN, BUPATI BLITAR DIDEMO WARGA

Blitar - Kades Tulungrejo, Kec. Gandusari, Kab. Blitar diduga terbitkan Surat Keputusan (SK) pemecatan Sekretaris Desa (Sekdes) yang tidak sesuai aturan. Hal ini mengakibatkan Bupati Blitar, Rijanto didemo puluhan warga.

Koordinator aksi, Jaka Prasetya sebelum orasi meminta seluruh warga yang melakukan aksi, tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker dan menjaga jarak. "Demikian juga jumlah warga yang aksi juga dibatasi, sesuai protap kesehatan dari Polres Blitar," tutur Jaka di depan Kantor Bupati Blitar Kanigoro, Rabu (17/6).

Disampaikan Jaka, aksi ini merupakan aspirasi dari adanya kebijakan seorang kades yang tidak prosedural dan tidak sesuai aturan. "Yaitu Kades Tulungrejo menerbitkan SK pemberhentian dengan tidak hormat, Sekdes yang diseleksi dan diangkat oleh pemkab bukan pilihan warga desa," kata Jaka.

Berbagai upaya sudah dilakukan Sekdes Sulhendar, namun tidak membuahkan hasil. Maka dengan beberapa warga dan dibantu pendampingan hukum oleh LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), melakukan aksi menuntut Bupati Blitar mencabut atau membatalkan SK pemberhentian sekdes tersebut. "Karena tidak prosedural dan tidak sesuai aturan, sementara kades diangkat oleh bupati dan bisamerusak citra kepala daerah," tandasnya.

Diungkapkan Jaka prosedural yang dimaksud yaitu laporan terhadap pejabat pembina yaitu camat, tahap peringatan, sampai sanksi pemberhentian. Termasuk konsideran dasar aturan yang digunakan juga tidak sesuai, sehingga SK tersebut

cacat hukum. "Karena cacat hukum, maka harus dicabut atau dibatalkan. Bupati harus tegas, karena Kades diangkat oleh bupati dan harus mematuhi aturan yang ada," teriak Jaka dalam orasinya.

Untuk diketahui, Alasan pemecatan Sekdes diantaranya diduga memalsukan tanda tangan kades, tidak bisa bekerja proporsional dan profesional. Diberhentikan sejak 8 Juni 2020 lalu, sesuai SK yg diterbitkan Kades Tulungrejo

Dengan pengamanan dari personel Polres Blitar dan Polsek Kanigoro, aksi berjalan damai. Selanjutnya 5 orang perwakilan aksi diundang masuk ditemui pihak Pemkab Blitar. Perwakilan aksi diterima berdialog oleh pihak Pemkab Blitar, yaitu Kepala Inspektorat Achmad Lazim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dindamade) Mujianto, Kepala Bakesbangpol Dicky Cubandono dan dari Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Endar Soeparno.

Setelah mendengar aspirasi warga, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dindamade) Mujianto, menyampaikan bahwa tim dari Pemkab Blitar yakni Inspektorat, Bakesbangpol, Bagian Hukum, Dindamade dan Camat Gandusari sudah melakukan langkah-langkah terkait SK pemberhentian Sekdes Tulungrejo tersebut. "Kami sudah mempelajari dan berkoordinasi dengan pihak terkait, kesimpulannya memang SK tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada dan direkomendasikan agar ditinjau ulang," kata Mujianto.

Salah satu hal mendasar terkait pemberhentian perangkat desa, meskipun itu wewenang kades tetap harus mengacu pada aturan yang ada yaitu mulai UU, PP,



Warga Desa Tulungrejo, Kec. Gandusari demo ke kantor Bupati Blitar karena Kadesnya diduga terbitkan SK pemecatan Sekdes yang tak sesuai aturan

Perda dan Perbup. "Diantaranya rekomendasi dari camat, kenyataannya camat tidak pernah diajak koordinasi dan dimintai rekomendasi," beber Mujianto yang diakui Camat Gandusari, Bambang yang juga hadir dalam dialog tersebut.

Kesimpulan dari dialog tersebut, SK yang diterbitkan Kades Tulungrejo Suwadi tidak sesuai aturan dan minta ditinjau ulang. Bahkan surat tanggapan dari camat, tidak direspon oleh kades.

Secara terpisah Kades Tulungrejo, Suwadi melalui penasihat hukumnya Karsono ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan jika yang bisa membatalkan SK tersebut ada dua yaitu keputusan pengadilan dan kades sendiri. "Kalau memang dianggap cacat hukum silahkan dibuktikan melalui pengadilan TUN, kalau dibatalkan sendiri jelas tidak mungkin. Karena warga disana akan memprotesnya," pungkasnya. (ais)

JK DORONG MASJID BERPERAN MEMAKMURKAN JEMAAH

Surabaya- Di tengah pandemi Covid-19, Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) mendorong takmir masjid ikut berperan memakmurkan jamaahnya. Tak hanya memikirkan memakmurkan masjid.

"Jadi masjid harus menjadi percontohan dalam segala bidang kehidupan. Masjid harus bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi jemaah," katanya di Masjid Al Akbar Surabaya, Rabu (17/6).

Yang diperlukan sekarang, kata tokoh yang juga Ketua Umum PMI ini, bagaimana agar masjid juga bisa memakmurkan jamaahnya. Sebab, jika jamaahnya makmur, maka dengan sendirinya masjidnya juga makmur.

Ia pun mengatakan bahwa di Indonesia ini, kalau ada sepuluh orang kaya, yang menjadi bagian umat hanya satu. Sebaliknya, kalau bicara 100 orang miskin di negeri kita, maka yang 90 adalah umat Islam. "Sekarang ini kita masih lebih banyak mustahik (orang yang berhak

menerima zakat, red) ketimbang muzaki (orang yang wajib zakat). Saatnya masjid harus berperan memperbanyak para muzaki," katanya.

Wakil Presiden RI (2004-2009 dan 2014-2019) ini berkunjung ke Masjid Al Akbar untuk melihat kesiapan masjid nasional tersebut untuk menghadapi New Normal. Juga sempat bertemu dengan pengurus PW DMI dan PD DMI kota/kabupaten se Jawa Timur.

JK datang didampingi M Aksa Mahmud, mantan Menkumham Hamid Awaludin dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. Sebelum ke Masjid Al Akbar ia sempat bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indaf Parawansa di Gedung Grahadi dan kantor PMI Jatim yang dipimpin Imam Utomo.

Dalam kesempatan tersebut, ia kembali mengingatkan para takmir masjid untuk tetap menjalankan protokol pencegahan Covid-19. Caranya dengan menjaga jarak antar jamaah, sediakan tempat cuci tangan pakai sabun, dan pakai masker.



Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla melihat kesiapan new normal di Masjid Al Akbar Surabaya

Dia menekankan tak ingin masjid menjadi tempat penularan Covid-19. Dan ini sudah ia pikirkan sejak Januari 2020 lalu. "Kita tahu di Korsel, Covid pertama menyebar di gereja yang suka bikin kebaktian. Di Iran menyebar dimulai dari masjid. Kita tak ingin itu," katanya. JK mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia. Arab Saudi pun kalah. Sekarang Arab Saudi punya 10 ribu masjid. Indonesia 10 kali lipat. (ist)

ANAK PRAMONO ANUNG DAN 3 PETAHANANA JATIM DIPANGGIL DPP PDI-P

SURABAYA - Putra Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramono, yang juga politisi PDI-P, masuk sebagai calon bupati Kediri yang direkomendasikan PDI-P dalam Pilkada Kediri. Hanindhito hadir memenuhi panggilan DPP PDI-P bersama tiga petahana asal Jawa Timur, yaitu Bupati Blitar Rijanto, Wali Kota Blitar Santoso, dan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI-P Jawa Timur Deni Wicaksono menjelaskan, keempatnya dipanggil datang ke DPP PDI-P guna pengerucutan calon kepala daerah yang akan diusung PDI-P untuk Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. "Kalau pengumuman calon yang akan diusung akan dilakukan sekitar akhir Juni atau awal Juli 2020," ujar Deni, Rabu (17/6). Untuk diketahui pemanggilan dilakukan pada Minggu (14/6).

Pengumuman calon bersamaan dengan 16 calon lainnya dari 16 daerah di Jawa Timur, termasuk Kota Surabaya. Sebelum pandemi, PDI-P sudah mengumumkan tiga pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk Jatim. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Malang untuk petahana Bupati Malang Sanusi berpasangan dengan Didik Gatot Subroto.

Daerah lainnya yaitu Kabupaten Ngawi untuk petahana Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar berpasangan dengan Dwi Rianto Jatmiko, serta petahana Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi berpasangan dengan Dewi Khalifah.

Sebelumnya diberitakan, 19 kabupaten/kota di Jatim menggelar pilkada. Daerah tersebut yaitu Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Ngawi. Kemudian Kabupaten



Putra Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramono digadang sebagai calon kuat di Pillbup Kediri

Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik, serta Kabupaten Kediri. Semula pilkada serentak dijadwalkan pada Juli 2020. Namun, karena pandemi Covid-19, pelaksanaan pilkada diundur menjadi 9 Desember 2020.(ist)

KPU PASTIKAN APD UNTUK PILKADA SERENTAK DIREALISASIKAN JULI

Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan protokol kesehatan akan dilaksanakan ketat untuk menjamin penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 aman dari Covid-19. Protokol kesehatan dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) dirancang untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam pemilu.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, "KPU dalam menyusun regulasi mengedankan dua hal penting yaitu kesehatan dan keselamatan untuk seluruh pihak. Karena itu kami atur kebutuhan pendukung untuk kesehatan dan keselamatan itu," ujar Arief dalam webinar Pilkada Serentak 2020 Rabu (17/6).

Terkait dengan hal tersebut, KPU telah menganggarkan kebutuhan APD bagi penyelenggara pemilu. Direncanakan pada Juni dan Juli 2020 ini APD akan diadakan untuk kemudian didistribusikan bagi petugas pemilihan.

Protokol kesehatan itu juga ditujukan kepada pemilih. KPU akan mengingatkan kepada masyarakat yang datang ke TPS untuk memakai masker. Jika tidak, petugas di TPS telah menyiapkan agar mereka menggunakan. Selain itu, di setiap TPS juga akan disediakan hand sanitizer. Bagi yang tidak terbiasa menggunakan, TPS juga akan dilengkapi dengan tempat mencuci tangan.

"Bagaimana dengan tempat mencoblos atau di bilik suara? Kami sempat berpikir untuk membeli alat coblos sekali pakai. Namun karena harga mahal, kami menyediakan sarung tangan plastik yang digunakan sekali pakai," kata Arief.

Menurut dia, sarung tangan ini dipandang akan menjadi alat pelindung bagi pemilih ketika menggunakan hak suaranya di TPS. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu takut atau khawatir untuk datang dan menyalurkan hak pilihnya.

Pilkada Serentak akan digelar pada 9 Desember 2020. Jadwal ini mundur dari rencana awal pada 6 Juni dan akhirnya mundur lagi pada 23 September karena pandemi. Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Arief sebelumnya menuturkan, KPU optimistis setelah Agustus kondisi Covid-19 cenderung dapat dikendalikan. Karena itu, dia meyakini masyarakat juga akan antusias untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini.

Terpisah, staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengatakan, protokol kesehatan tersebut penting agar tidak memicu penularan Covid-19 saat pelaksanaan pilkada. Hal ini dinilai juga akan menjadi reputasi yang baik bagi Indonesia di mata dunia apabila berhasil melaksanakannya.

"Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dengan partisipasi masyarakat yang tinggi



Ketua KPU Arief Budiman

harus dibarengi protokol kesehatan ketat sehingga tidak memicu penularan Covid-19. Ini akan menjadi reputasi yang baik bagi bangsa Indonesia di mata dunia," ujar Kastorius dikutip dari siaran pers, Rabu (16/6).

Ia mengatakan, Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang itu menjadi unik karena keharusan penerapan protokol kesehatan. Kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan itu juga menjadi kunci pelaksanaan Pilkada 2020 bisa sukses tanpa memunculkan sebaran baru Covid-19.(ist)

Merry Riana :

HADAPI COVID-19

LEBIH BAIK

'PARNO'

DARIPADA

SEMBRONO



Foto : lifepal.co.id

Menghadapi normal baru saat pandemi COVID-19 ternyata ada mantranya menurut motivator Merry Riana, yaitu "Get Up, Dress Up, Show Up, and Never Give Up".

"'Get up', ini saatnya bangkit. Mungkin selama 12 minggu ini bisa bekerja sambil rebahan di rumah. Ini saatnya rebahan sambil tetap produktif," kata Merry dalam jumpa pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang diikuti melalui akun Youtube BNPB Indonesia di Jakarta (Selasa, 16/6/2020).

Merry mengatakan jangan menunda-nunda untuk bangkit dan menjadi orang pemalas. Buang rasa malas dan bangkit, jangan menunggu atau menunda esok hari.

Sedangkan "dress up" berarti harus berpakaian rapi dan menjaga kebersihan meskipun bekerja di rumah saja.

"Mungkin belakangan di rumah kita hanya memakai daster dan tidak rapi. Pakaian rapi adalah tanda kesiapan kita untuk lebih produktif," tuturnya.

Berikutnya adalah "show up" yang berarti tunjukkan kemampuan, inovasi, dan eksperimen diri. Menunjukkan kemampuan tidak hanya saat di kantor, tetapi juga bisa di rumah.

"Ini saatnya kita harus menghargai pekerjaan dan kesempatan yang diberikan pada kita. Mungkin anda jago memasak, tunjukkan kemampuan anda," katanya.

"Never give up" artinya jangan pernah menyerah. Menurut Merry, semua hal baru pasti memerlukan penyesuaian. Saat melakukan hal-hal baru, kadang harus menghadapi kegagalan dan pembelajaran.

"Perlu waktu untuk bisa menjadi ahli, maka jangan pernah menyerah. Mungkin ada yang bilang hidup tidak semudah kata Merry Riana, tapi saya tidak pernah bilang hidup itu mudah. Karena itu jadilah orang yang tangguh untuk terus bangkit dan tidak mudah menyerah," tuturnya.

Nama Merry Riana kini tengah melambung sebagai seorang Entrepreneur Perempuan yang sukses di usia muda. Ia juga Seorang Speaker, Trainer dan menjadi Motivator Wanita No.1 di Asia. Profil kesuksesan Merry Riana mulai dikenal publik setelah muncul di artikel The Strait Times pada tanggal 26 Januari 2007 yang berjudul "She's made her first million at just age 26" -Ia mencapai satu juta dolar pertamanya di usia 26 tahun.

Merry Riana dilahirkan pada 29 Mei

1980 di Jakarta. Ayahnya bernama Ir. Suanto Sosrosaputro dan ibunya, Lynda Sanian. Merry Riana lahir dan tumbuh di Jakarta dalam sebuah keluarga sederhana keturunan Tionghoa.

Merry Riana memulai pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) Don Bosco Pulomas, tamat dari sana ia kemudian masuk di SMP Santa Ursula dan juga SMA Santa Ursul, yang merupakan sekolah Katolik khusus perempuan yang berada di Jakarta Pusat.

Setelah lulus dari SMA, Merry hendak melanjutkan kuliahnya di Universitas Trisakti. Namun, cita-cita untuk kuliah di Jurusan Teknik Elektro Universitas Trisakti buyar karena kerusuhan besar di tahun 1998.

Karena kondisi yang tidak aman khususnya bagi masyarakat keturunan Tionghoa, Merry kemudian pergi ke Singapura untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Merry pun akhirnya kuliah di jurusan Electrical and Electronics Engineering (EEE) di Nanyang Technological University (NTU) pada tahun 1998. Merry mengaku jurusan ini menjadi jurusan yang pas karena ia bercita-cita menjadi seorang insinyur (Ant).



Foto : arifrahman.id



KESEHATAN SELAMA
NEW NORMAL
MERUPAKAN
TUGAS BERSAMA

Saat pandemi virus Corona (Covid-19) dan new normal, tenaga medis semakin banyak mendapatkan laporan dan membantu orang-orang untuk pulih dari stres, kecemasan dan depresi.

Direktur Deborah Marin, Profesor Psikiatri sekaligus Direktur Pusat Spiritualitas dan Kesehatan mengungkapkan bahwa kesehatan mental menjadi penting untuk berada di garis terdepan selama pandemi virus corona.

Apa tantangan kesehatan mental yang paling umum yang menurut penelitian akan dihadapi oleh petugas medis?

Dunia mengetahui bahwa sebagian besar orang mengalami kesedihan, kesedihan, kehilangan, dan kecemasan. Kecemasan bukan hanya tentang sakit tetapi tentang membuat orang yang dicintai sakit.

Orang-orang juga merasa tertekan dan menunjukkan tanda-tanda PTSD selama pandemi. PTSD (post-traumatic stress disorder) atau gangguan stres pascatrauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan.

Virus corona (Covid-19) menular sangat agresif. Ada ketakutan luar biasa akan gelombang kedua virus corona saat periode new normal muncul kembali.

"Orang-orang marah karena kami tidak bisa membiarkan anggota keluarga masuk ke ruang rumah sakit. Biasanya, orang-orang menunjukkan kasih sayang dengan merawat orang yang disayangi, tetapi tidak untuk pandemi virus corona," ungkapnya seperti yang dikutip dari Psychology Today (Selasa, 16/6/2020).

Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi Corona? Model ini mencakup berbagai pendekatan untuk menawarkan skrining gratis bagi tenaga kesehatan untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka.

Memberikan umpan balik tentang apa yang mereka lakukan dan sumber daya yang dapat mereka gunakan untuk menjaga diri mereka sendiri dan berfungsi sebaik mungkin. Memberikan lokakarya seperti dari segi kerohanian, moral, atau aktivitas fisik.

Juga akan ada hubungan yang mulus dengan psikiatri sehingga orang yang membutuhkan bantuan akan dapat mengakses layanan kesehatan mental.

Idenya adalah untuk memitigasi perkembangan yang sayangnya kita tahu akan terjadi beberapa bulan ke depan. Itu lengan klinis, dan ada lengan penelitian juga.

Sesuai saran dari Centers for Disease Control and Prevention, lembaga kesehatan

AS, yang mengatakan bahwa kita perlu mengenakan masker kain di tempat umum.

Dengan mengenakan masker, kita diharapkan dapat memperlambat dan mencegah penyebaran virus dari satu orang ke orang lainnya.

Kondisi New Normal membuat kita terpaksa akan lebih sering berada di luar rumah. Kita semua akan kembali bersentuhan dengan apa pun yang ada di sekitar.

Oleh karena itu, pastikan selalu membawa hand sanitizer dengan kandungan 70 persen ke mana pun berpergian. Gunakan hand sanitizer setelah beraktivitas atau setelah melakukan hal apa pun.

Ini penting juga, kebiasaan saling mengingatkan harus mulai ditumbuhkan. Hal kecil yang bisa kita lakukan contohnya, turut menyumbang produk disinfektan seperti tisu basah antiseptik di area atau meja kerja kita. Ingatkan juga pentingnya jaga jarak, misalnya tidak berada di satu ruangan rapat berisi terlalu banyak orang.

Mengatasi pandemi Corona memang bukan tugas perorangan, tapi tugas bersama agar wabah segera teratasi. Selalu jaga kebersihan dan menjalani gaya hidup sehat (ist).

JALAN

MEWUJUDKAN

KOMITMEN MENUJU

ERA MOBIL LISTRIK

ELECTRIC
CAR CHARGER

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai terus berjalan.

"Pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai di dalam negeri terus berlangsung termasuk pemberian insentif PPnBM," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Djamil dalam jumpa pers virtual di Jakarta (Senin, 15/6/2020).

Ridwan menuturkan sejak awal pemerintah sudah memutuskan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik termasuk membangun industri kendaraan listrik beserta infrastruktur pendukungnya di Indonesia.

Salah satu yang difasilitasi yakni insentif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai

PPnBM.

"Sebelum kendaraan listrik nasional bisa dibangun di dalam negeri, kita mendorong agar dapat dimudahkan mendatangkan kendaraan listrik dari luar (impor) dalam jumlah dan periode waktu tertentu. Itu yang kemudian kita kawal agar dapat dilakukan sesuai rencana," imbuhnya.

Pemerintah juga telah menetapkan prioritas pengembangan pada kendaraan bermotor berbasis baterai. Saat ini, pembangunan infrastruktur pendukung seperti tempat pengisian listrik terus dikembangkan.

"Beberapa perusahaan sudah mulai dan sudah pula berkonsorsium seperti Pertamina dan PLN. Yang menarik, industri dalam negeri juga sudah memperlihatkan kapasitasnya. BPPT misalnya, sudah membangun stasiun pengisian listrik dan sudah dimanfaatkan," jelasnya.

Ridwan menjelaskan pentingnya Indonesia terus mendorong pengembangan kendaraan listrik di Tanah Air,

yakni untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM), mengurangi polusi, serta memaksimalkan kapasitas terpasang listrik yang ada.

Selain itu, Indonesia juga punya kelebihan ketersediaan bahan baku baterai listrik. Pasar besar Indonesia untuk sektor otomotif pun diharapkan bisa dinikmati industri dalam negeri dengan pengembangan kendaraan listrik tersebut.

Ridwan menambahkan, komunikasi dengan para investor di bidang tersebut juga terus dibangun, di antaranya dengan investor asal Korea Selatan, Jepang dan China.

"Kita sudah bicara dengan beberapa industri dari Korea, Tiongkok, Jepang juga. Pemain besar itu kita sudah komunikasi," tutupnya.

Sebelumnya sudah diberitakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik (Mobil Listrik) pada bulan Agustus 2019. (ist)



*Tampil
Fresh dan
Penuh Gaya
Dengan Dress*

Dress jadi item busana favorit kaum hawa karena cocok dipakai dalam segala suasana. Selain simple, jenis busana ini relatif nyaman dan memberi kesan segar penuh gaya. Kamu suka dress model apa?

Suka mengenakan dress? Jika kamu menyukai tampilan feminine, outfit yang satu ini memang tidak boleh terlewatkan. Namun, banyak perempuan yang beranggapan kalau menggunakan dress bikin penampilan terlihat monoton. Padahal, sama halnya dengan memadupadan-

kan atasan dan bawahan, kamu pun bisa ngemix & match gaya berpakaianmu sewaktu mengenakan dress untuk mendapatkan penampilan yang fresh.

Dress hitam seringkali menjadi item yang harus dimiliki perempuan. Selain simpel, keunggulan lainnya saat kamu me-

makai dress hitam adalah antikotor. Selain juga dress hitam mudah dipadupadankan dengan model outfit lainnya. Dilansir dari Stylecraze, berikut 3 macam dress penuh gaya yang wajib ada di lemarmu.



Flared dress

Tidak ada siluet yang lebih bagus dari model klasik tahun 1950-an ini. Kamu akan terlihat lebih cantik jika memadukannya dengan belt di pinggang serta melapisinya dengan outer.

Cara memakainya: Gunakan belt pinggang untuk tetap memperlihatkan potongan di bagian tengah dress. Jika menggunakannya untuk bekerja di kantor, maka gunakanlah cardigan sebagai outernya.



Lace dress

Gaun hitam klasik menjadi lebih glamor saat tertutup renda. Bahkan, desainer seperti Dolce & Gabbana mempertahankan dress dengan tampilan klasik ini.

Cara memakainya: Meskipun beraktivitas di luar ruangan, dress ini sangat cocok. Pilihlah sepatu dan perhiasan yang netral. Make up dengan menggunakan smokey eye yang dramatis atau bibir merah tebal akan membuat kamu sangat memukau.



Party dress

Gaun pesta. Apakah itu berhiaskan berlian, berbulu atau dilapisi dengan panel transparan, gaun pesta hitam adalah jenis kebutuhan setiap lemari.

Cara memakainya: Bersenang-senanglah dengan berbagai pernik-pernik. Gunakan semua aksesoris, lapisilah dengan segala sesuatu yang berkilauan. Cocok untuk penampilan riasan yang berani ataupun sederhana. (Ist)

'The Hungry' (dari hal 1)

Ketua Gugus Tugas COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo mengungkapkan, selain menyelesaikan pandemi, pemerintah juga fokus mengatasi persoalan ekonomi. Terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Hal ini disampaikan Doni dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR.

"Jadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa setelah mendapatkan data-data tentang jumlah warga negara kita yang kehilangan pekerjaan. Kemudian membandingkan juga bagaimana langkah-langkah upaya kita dalam mengatasi COVID," ujar Doni kepada para anggota Komisi X melalui rapat virtual, Rabu (17/6).

"Maka pilihannya adalah paralel, kita tidak bisa membiarkan warga kita tidak mendapatkan pekerjaan," sambung dia.

Doni menjelaskan, kalau masyarakat tidak memiliki daya beli yang cukup atau tidak punya uang untuk membeli makanan maka otomatis imunitas tubuhnya akan rendah. Dan mereka pun berpotensi terpapar COVID-19. "Oleh karenanya kita harus membuat kegiatan ini paralel. Masyarakat tidak boleh terpapar COVID, namun juga tidak boleh terpapar karena PHK. The hungry man becomes an angry man, orang yang lapar akan marah," ungkap Kepala BNPB itu.

Ia meminta pejabat-pejabat di daerah agar mereka yang kehilangan pekerjaan mendapat atensi. Pemerintah pusat pun sudah menerapkan sejumlah langkah. "Baik bantuan sosial maupun bantuan langsung tunai. Semua ini semata mata adalah untuk membuat masyarakat yang kehilangan pekerjaan tetap mendapatkan asupan-asupan makanan yang memadai," tutup Doni.

Sebelumnya, Kemnaker mencatat 1.792.108 pekerja Indonesia dirumahkan atau terkena PHK sebagai dampak pandemi Covid-19 (data sampai 27 Mei 2020). Rincian data yang telah diverifikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan itu adalah 1.058.284 pekerja sektor formal dirumahkan, 380.221 pekerja formal terkena PHK, 318.959 pekerja sektor informal terdampak Covid-19, 34.179 calon pekerja migran gagal diberangkatkan serta 465 pemegang dipulangkan.

Sementara itu, jumlah kasus positif corona di RI masih terus meningkat. Pada hari ini, Rabu (17/6), ada penambahan 1.031 kasus, sehingga total menyentuh 41.431. Pasien sembuh kini

berjumlah 16.243, dan kasus meninggal mencapai 2.276.

"Total kasus positif ini karena tracing dengan kontak dekat yang dirawat di rumah sakit secara lebih agresif," kata Jubir Penanganan Corona di Indonesia, Achmad Yurianto di BNPB, Rabu (17/4).

Dengan penambahan hari ini, kasus positif di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Menyalip Singapura dengan catatan 41.216 kasus, menurut data Worldometers. Namun, pasien sembuh di Singapura sudah menyentuh 31.163 kasus. Sementara angka kematiannya juga kecil, 26 kasus.

Lalu ada Filipina dengan kasus positif terbanyak ketiga di Asia Tenggara. Catatannya, ada 26.781 kasus positif, 6.552 sembuh, dan 1.103 kematian.

"Seluruh dunia menyatakan hal yang sama untuk menyikapi pandemi COVID-19. Segera beradaptasi dengan kebiasaan baru agar kita aman dari COVID-19," sambung dia.

Padahal jumlah tes di Indonesia juga masih sedikit, baru 559.872 tes. Sangat sedikit apabila dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 273 juta. Itu berarti tes corona di RI baru mencapai 2.048 per 1 juta penduduk.

Bandingkan dengan Singapura yang berpenduduk hanya sekitar 5.8 juta, tesnya mencapai 576.189 tes. Itu berarti tes corona di Singapura mencapai 98.519 per 1 juta penduduk. Atau bandingkan juga dengan Filipina yang penduduknya padat juga, mencapai sekitar 109 juta orang. Tes mereka menyentuh 526.100. Dengan kata lain, tes corona di Filipina mencapai 4.804 per 1 juta penduduk.

Zona Hijau Berkurang

Walhasil, zona hijau atau daerah bebas virus corona di Indonesia juga semakin berkurang. Doni Monardo mengatakan, sebelumnya tercatat ada 92 Kabupaten Kota yang masuk zona hijau namun kini berkurang menjadi 85 daerah.

"(Zona) hijau belum terdampak awalnya ada 92 Kabupaten Kota sekarang berkurang menjadi 85, artinya sangat dinamis daerah hijau harus extra keras agar mereka tidak terdampak," kata Doni.

Adapun maksud dari warna yang digunakan untuk menentukan status daerah berdasarkan kajian zonasi tim pakar dengan ketentuan dari WHO. Zona merah artinya masih berisiko tinggi

tertular COVID-19, zona oranye berisiko sedang, zona kuning berisiko rendah, dan hijau belum ada kasus corona.

Sementara, kata Doni, saat ini ada 136 daerah dengan zona kuning. Sementara, ia tak merinci ada berapa daerah lainnya yang masuk dalam zona oranye atau merah. Ia mengatakan, kajian zonasi ini dapat digunakan untuk dasar bagi daerah memperbolehkan adanya aktivitas warga atau tidak.

"Maka boleh lakukan aktivitas sesuai kajian tiap daerah sehingga daerah sedang dan risiko tinggi belum bisa dan itu harus dapat pengawalan dari TNI-Polri," kata Doni.

Doni mengatakan, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus ikut gotong royong untuk menangani penyebaran virus corona ini. Ia mengatakan, kegiatan masyarakat dalam new normal harus berjalan, namun penularan virus pun harus bisa ditekan.

"Kami yakin dengan kerjasama gotong royong persatuan yang ada dari tingkat pusat ke daerah kita bisa lakukan lebih baik lagi. Intinya kegiatan tetap harus berjalan dan kita harus ikuti kebijakan kepala pemerintahan kita Bapak Jokowi," pungkasnya.(ist,ins)

New Normal (dari hal 1)

pernikahan sedang kita susun protokol kesehatannya, meskipun belum secara resmi tertulis," ungkapnya.

Jadi siapa pun yang menggelar kegiatan melibatkan banyak orang, harus dibatasi dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Seperti wajib pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. "Seperti di KUA terlihat dibatasi ketika menggelar ibadah kabul, demikian juga resepsi tidak boleh mengundang orang banyak jika lokasinya sempit sehingga tidak bisa menjaga jarak," terang Krisna.

Meskipun sebenarnya kegiatan yang mengakibatkan kerumunan banyak orang tidak diperbolehkan, termasuk resepsi pernikahan. Demikian juga destinasi atau tujuan wisata, hingga kini juga belum boleh dibuka sampai peraturan mengenai New Normal Life selesai dibahas. "Dasarnya dari Kementerian Pariwisata tidak boleh dibuka, semuanya tidak hanya daerah zona merah saja," pungkasnya.

Kesebelas kecamatan yang masuk zona merah tersebut diantaranya : Wonodadi, Ponggok, Nglegok, Srengat, Sanan Kulon, Kesamben, Selopuro, Wates, Panggungrejo, Sutojayan dan Bakung.(ais)

EKONOMI RI BERGERAK KE SKENARIO TERBERAT DAN TERPARAH

Jakarta-Pemerintah memproyeksi ekonomi domestik tahun ini terancam bergerak ke skenario sangat berat. Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi ditargetkan minus 0,4 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, perekonomian Indonesia terancam bergerak dari skenario berat menjadi sangat berat hingga akhir tahun. Hal tersebut lantaran adanya tekanan yang sangat berat terhadap perekonomian akibat pandemi COVID-19.

Adapun dalam skenario berat pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih tumbuh di kisaran 2,3 persen. Sementara untuk skenario sangat berat pertumbuhan ekonomi akan mengalami kontraksi 0,4 persen.

"Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I hanya 2,97 persen, ini menunjukkan koreksi aktivitas ekonomi dan mengindikasikan tekanan berat sepanjang 2020. Ekonomi terancam bergerak dari skenario berat menjadi sangat berat," ujar Febrio saat video conference, Rabu (17/6).

Dia melanjutkan, untuk itu penanganan pandemi virus corona di dalam negeri harus terus diperkuat dan dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, pemulihan diharapkan bisa berjalan secara bertahap.

Hingga saat ini, kata Febrio, pemerintah telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran pada tiga hal, yaitu kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan bantuan untuk dunia usaha guna menahan kejatuhan ekonomi

"Makanya apa kita lakukan di 2020 ini akan menentukan di 2021, bagaimana pemulihannya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi perekonomian di kuartal II 2020 akan minus 3,1 persen. Dia berharap, ekonomi di kuartal III dan IV tahun ini bisa mulai pulih agar ekonomi tak mengalami resesi dan 2021 bisa berjalan sesuai target.

"Kuartal II ini kontraksi akan terjadi karena full PSBB dilakukan di tempat yang berkontribusi ekonomi besar Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini akan pengaruh kuartal II ada di negatif teritori negatif 3,1 persen," ujar Sri Mulyani dalam video conference APBN KiTa, Selasa (16/6).

Adapun lembaga multilateral seperti Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau minus 2,8 persen hingga 3,9 persen di tahun ini. Angka ini jauh lebih rendah dari proyeksi Bank Dunia sebesar 0,0 persen di 2020.

Untuk skenario pertama, jika tak ada gelombang kedua COVID-19 di Indonesia, OECD memproyeksi ekonomi akan minus 2,8 persen. Sementara untuk skenario kedua, jika Indonesia tak bisa menghindari gelombang kedua virus corona, maka pertumbuhan ekonomi RI akan minus 3,9 persen.

Bisa Minus 3,4 Persen

Terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro memperkirakan, kuartal II akan menjadi periode terburuk bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia

diprediksi turun hingga minus (-) 3,4 persen.

"Kalau dilihat dari perkembangan terkini kita melihat kuartal II ekspektasi kami adalah kuartal yang paling dalam di tahun ini. Ekspektasi kami sudah sejak sebulan lebih lalu kita membuat forecast untuk kuartal kedua akan terkoreksi -3,4 persen," jelasnya dalam sesi teleconference, Rabu (17/6).

Menurut dia, perekonomian domestik masih punya peluang untuk kembali pulih, dengan asumsi tidak terjadi gelombang kedua (second wave) penyebaran pandemi virus corona (Covid-19). Jika itu tidak terjadi, Andry pun memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi nasional akan kembali tumbuh positif pada kuartal akhir tahun ini.

"Kita menghadapi second wave pandemi di global market. Buat Indonesia challenge-nya memang masih di first wave, tapi di negara-negara lain sudah masuk bagaimana second wave kembali menghambat," ujarnya. (ist)

Diskominfo



**DENGAN MEMBELI ROKOK BERCUKAI
ASLIBERARTI KITA TELAH IKUT
MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI
PEMBANGUNAN DAERAH**



Pembangunan jalan dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) Kabupaten Pasuruan.

H. H. ROYAO YUSUF, GE, MMA Wakil Bupati Pasuruan
WIL A. MUJIB BIRWAN, SH, MH Wakil Bupati Pasuruan

RAMALAN PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA & INDONESIA

-1,1%

World Bank

2020 -3,5% s.d 2,1%
2021 -5,2% s.d 5,6%

-2,2%

ADB

2020 2,5%
2021 5,0%

1,9%

Moody's

2020 3,0%
2021 4,3%

3,0%

IMF

2020 0,5%
2021 8,2%

Note: lingkaran --proyeksi dunia